

BAB IV

GAMBARAN UMUM KONTEKS DAN SETTING PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum

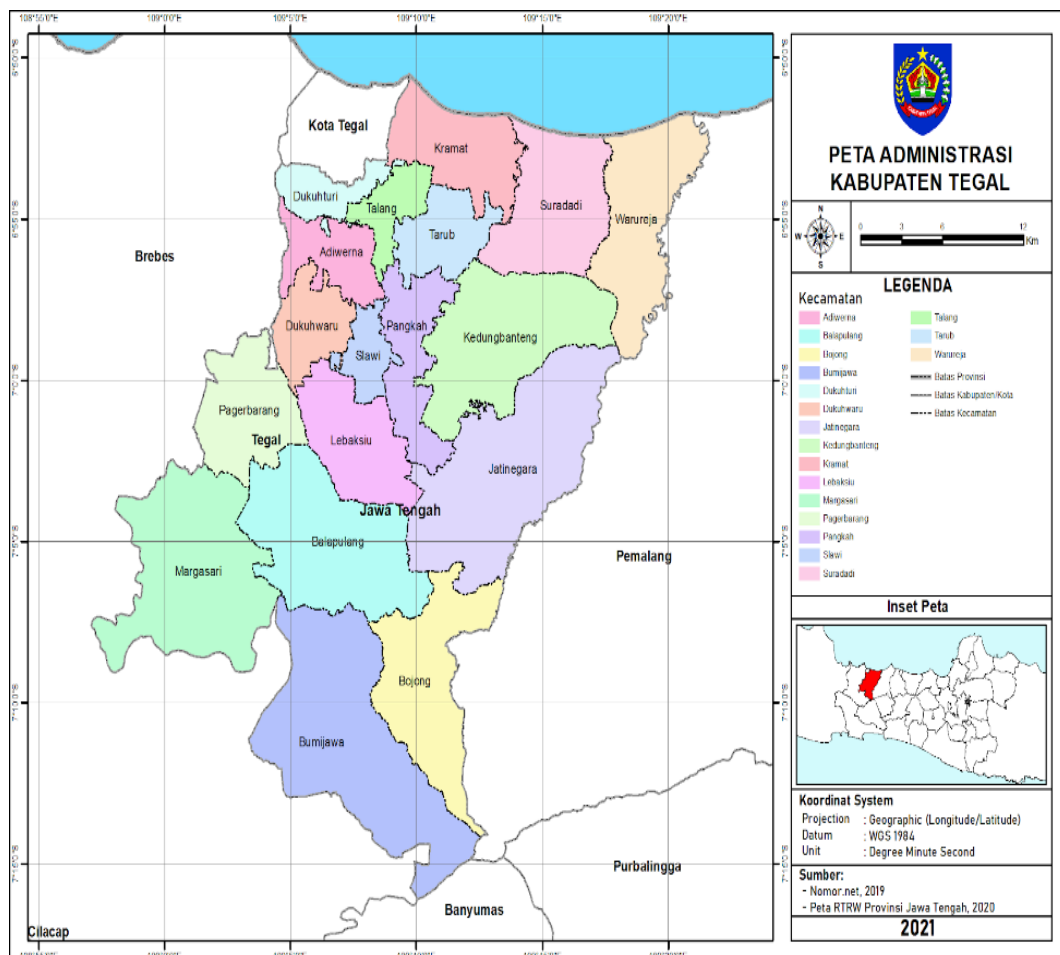
A. Kondisi Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 108057'6 - 109021'30 Bujur Timur dan 6050'41'' - 701515'30'' Lintang Selatan. Kabupaten Tegal berada di lokasi strategis, dilalui oleh jalur pantura dan berbatasan dengan Pantai Utara Jawa. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km²). Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa dengan luas 109,2 km², sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi dengan luas 13,8 km². Kabupaten Tegal berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7

Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

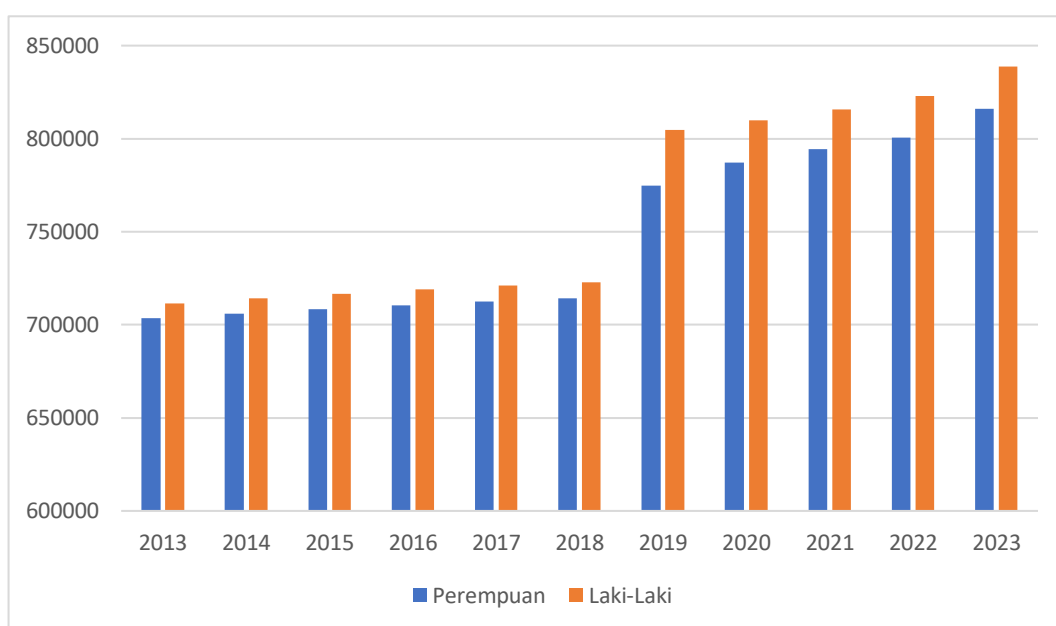


Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Tegal
Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, terdapat tantangan dalam penyelenggaraan musrenbang tentang bagaimana melibatkan para pemangku yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tegal *Pertama*, berkaitan dengan mobilisasi kelompok rentan dan *Kedua*, representasi kelompok rentan dalam keterlibatan padaproses perencanaan pembangunan daerah.

B. Kondisi Demografi

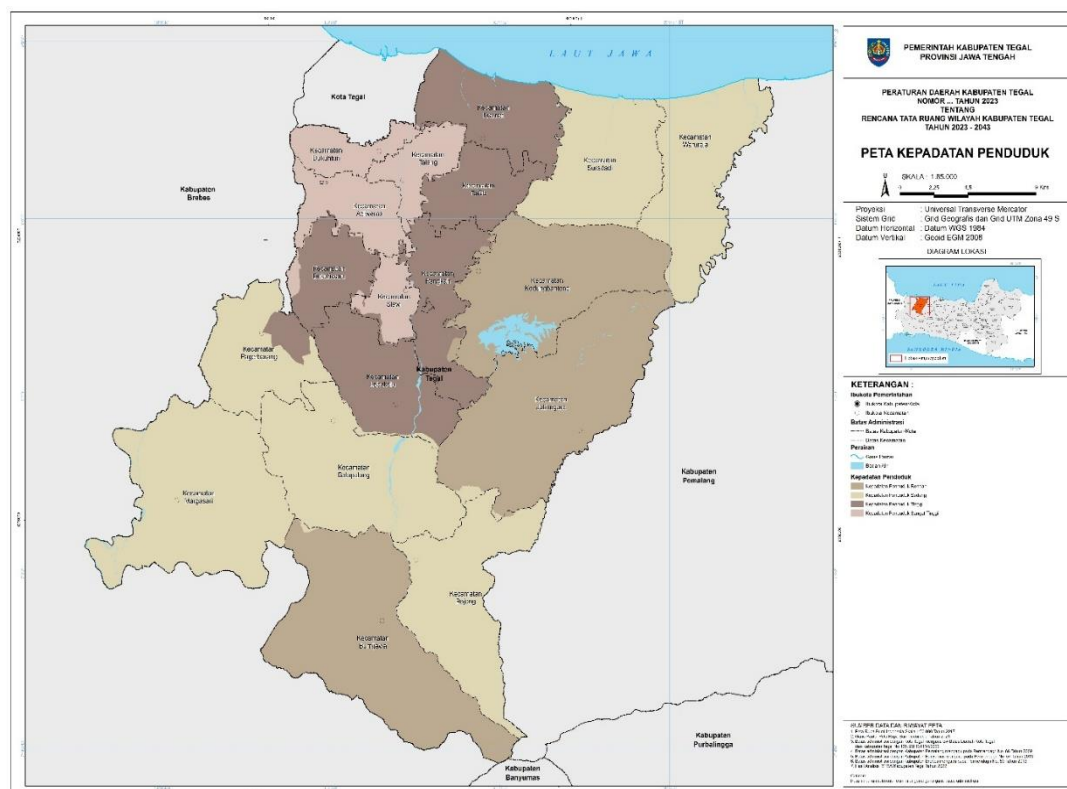
Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah 1.654.836 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 838.697 jiwa dan perempuan 816.139 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah 102,76 yang artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sebesar 1,25%.



Gambar 4.2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2013-2023
Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

Persebaran kepadatan penduduk cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 di 18 kecamatan cukup beragam. Tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi antara lain: (1) Kecamatan Dukuhturi dengan jumlah penduduk sebesar 103.290 atau 6,24% dari total penduduk Kabupaten Tegal dengan tingkat kepadatan 6.040 jiwa/km²; (2) Kecamatan Slawi dengan jumlah penduduk sebesar 81.790 atau 4,94% dari total penduduk Kabupaten Tegal dengan tingkat kepadatan 5.926 jiwa/km²; dan (3)

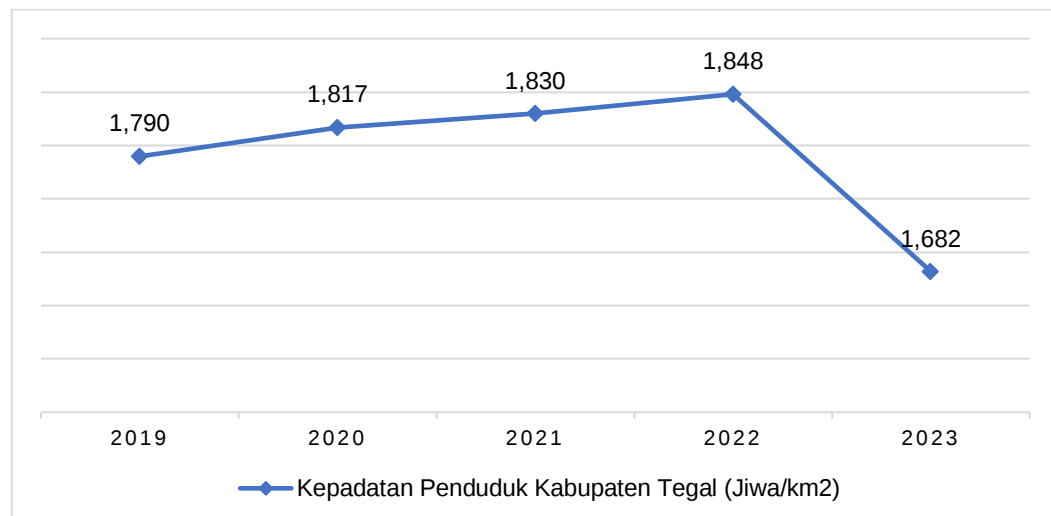
Kecamatan Talang dengan jumlah penduduk sebesar 110.070 atau 6,65% dari total penduduk Kabupaten Tegal dengan tingkat kepadatan 5.824 jiwa/km². Tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Tegal antara lain: (1) Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah penduduk sebesar 46.150 atau 2,79% dari total penduduk Kabupaten Tegal dengan tingkat kepadatan 558 jiwa/km²; (2) Kecamatan Bumijawa dengan jumlah penduduk sebesar 100.580 atau 6,08% dari total penduduk Kabupaten Tegal dengan tingkat kepadatan 565 jiwa/km²; dan (3) Kecamatan Warureja dengan jumlah penduduk sebesar 69.650 atau 4,21% dari total penduduk Kabupaten Tegal dengan tingkat kepadatan 1.095 jiwa/km².



Gambar 4.3. Peta kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2023-2043

Kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2023 secara riil terkategori yaitu 1.682 jiwa/km². Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal. Namun, kepadatan penduduk di tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan, dikarenakan penghitungan dengan jumlah luasan Kabupaten Tegal yang telah disesuaikan RTRW 2023-2043 yakni, 983,9 km². Namun, berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Tegal tiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, yang akan berdampak pada berbagai aspek, seperti tata kota, infrastruktur, dan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan perencanaan yang matang untuk menghadapi dampak dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.



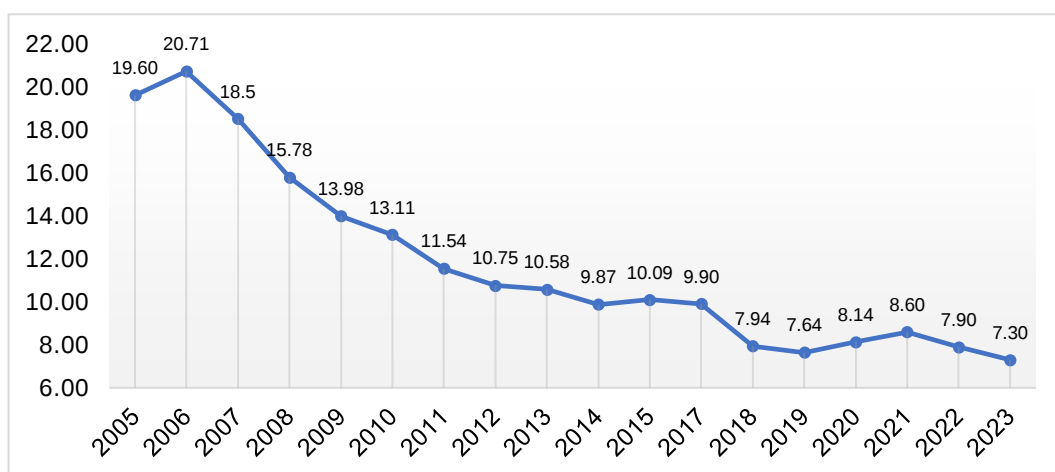
Gambar 4.4. Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

C. Indeks Kemiskinan

Data kemiskinan di Kabupaten Tegal dari tahun 2005 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun ada beberapa fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2011-2023.



Gambar 4.5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tegal Taun 2005-2023

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

Pada awal periode perencanaan jangka panjang daerah, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 19,60% pada tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan 20,71%. Namun, setelah itu, terjadi penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, tingkat kemiskinan menurun menjadi 13,98% dan terus berkurang hingga mencapai 9,87% pada tahun 2014. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Meskipun secara keseluruhan tren penurunan kemiskinan terlihat positif, ada beberapa tahun di mana tingkat kemiskinan sedikit meningkat atau stagnan. Misalnya, pada tahun 2015 dan 2016, tingkat kemiskinan masing-masing tercatat sebesar 10,09% dan 10,10%. Namun, penurunan kembali berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan tingkat kemiskinan mencapai 7,64% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 8,14%, menunjukkan dampak signifikan pandemi.

Setelah pandemi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 8,60%, tetapi kembali menurun menjadi 7,90% pada tahun 2022 dan 7,30% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Berbagai upaya dan kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi tampaknya berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tegal. Lebih rinci, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Kabupaten Tegal pada selama 2 Tahun terakhir telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,70% di Tahun 2022 dari 8,60 menjadi 7,90 dan 0,60% di Tahun 2023 dari 7,90 menjadi 7,30 sebagaimana tabel berikut:

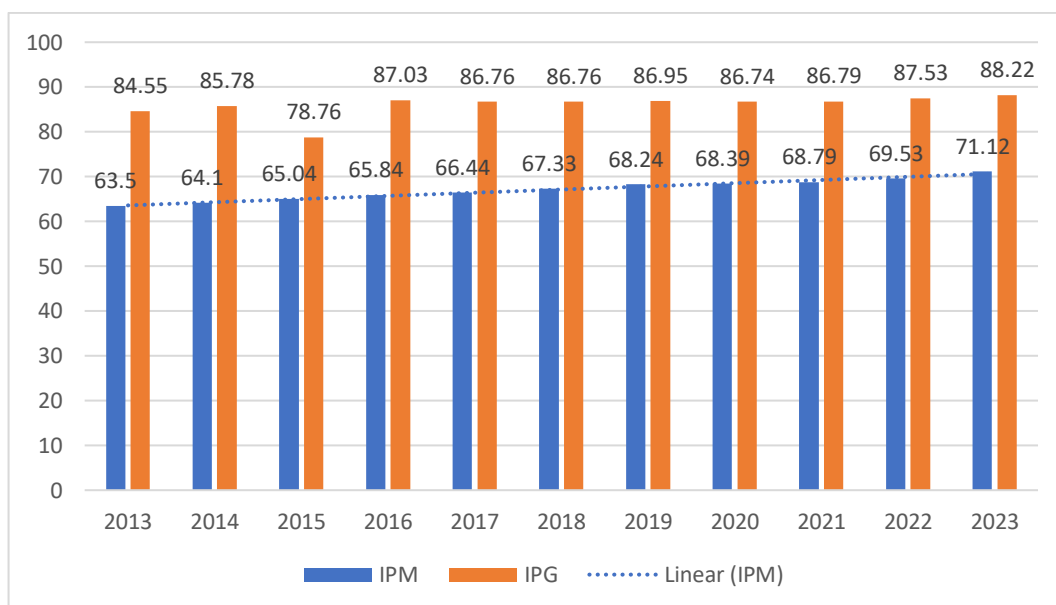
Tabel 4.1. Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal

Tahun	Angka Kemiskinan	Jumlah Orang Miskin (Jiwa)	Naik/ Turun
2019	7,64	109,94 Ribu	-0,3 %
2020	8,14	117,50 Ribu	+0,50 %
2021	8,60	123,52 Ribu	+ 0,46 %
2022	7,90	113,62 Ribu	- 0,70 %
2023	7,30	105,03 Ribu	- 0,60 %

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

D. Indeks Pembangunan Manusia dan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.



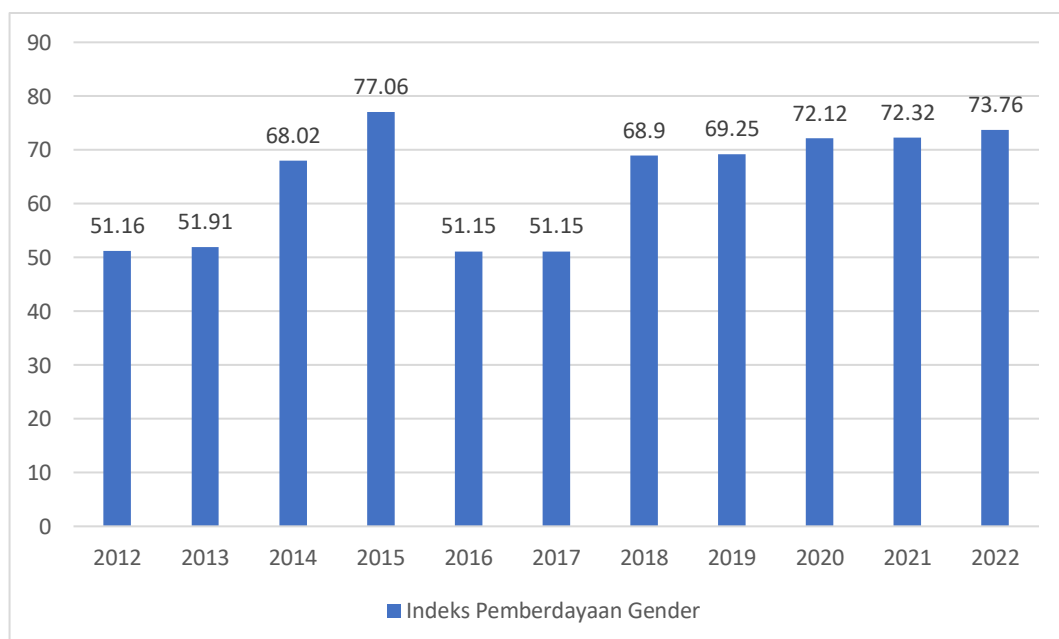
Gambar 4.6. Grafik IPM dan IPG Kabupaten Tegal (2013-2023)

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024), Telah diolah kembali

Pada tahun 2022 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,22 naik 0,69 poin dibanding IPG tahun 2021. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal sudah merata dan terdapat kesetaraan gender yang signifikan. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan

untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding IPM.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2022.



Gambar 4.7. Grafik IDG Kabupaten Tegal (2012-2022)

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal (2024), Telah diolah kembali

Berdasarkan Gambar 4.7. menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data yang dirilis BPS dari tahun 2012-2022. Data tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan diikuti tahun 2018 hingga tahun 2022, namun penurunan terjadi ditahun 2016.

E. Sistem Data Gender dan Anak dan Rehabilitas Sosial

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak. Pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal selama jangka waktu lima tahun jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak berjumlah 15 dengan Jumlah lembaga/instansi (48), sehingga persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak sebesar 31,25%.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa sebagai upaya dalam mencapai tujuan Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tabel berikut.

Tabel 4.2. Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	500	550	570	610	696	696
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	6,62	20,6	20,64	22,65	25,43	25,43

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,39	4,9	4,88	5,58	5,58	5,58
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	5	5,1	9	9	31	31
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	100	120	75	60	40	40
6	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	2	27,8	27,8	27,8	55,5	55,5

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal (2024)

Berdasarkan tabel diatas, capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak. Perencanaan program pemerintah khususnya dalam pemenuhan hak anak perlu untuk ditelaah dan dievaluasi kembali.

Data berikutnya adalah mengenai Rehabilitas Sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, terdiri atas layanan data/pendataan, Penyediaan permakanan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan Kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS, Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan,

Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan Pendidikan, reunifikasi Keluarga, dan layanan rujukan.

Tabel 4.3. Data Layanan Anak dan Penyandang Disabilitas

No.	Uraian	2023
Layanan Anak:		
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	72.657
2.	Yatim Piatu	2.271
Jumlah		74.928
Layanan Penyandang Disabilitas		
1.	Kartu Jateng Sehat (KJS)	2
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	794
3.	Permakanan	393
4.	Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)	96
5.	Cerebral Palsy (CP)	127
6.	Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia	107
7.	Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)	40
8.	Mari Belajar (Autis)	43
9.	Pelatihan DTLS dan Gergatin	35
10.	Pelatihan Wirausaha	55
11.	Pelatihan Teater	15
12.	Pelatihan Musik	9
13.	Pelatihan Batik Ciprat	30
14.	Pelatihan Tata Boga	20
15.	Pelatihan Kaki Palsu	30
16.	Pelatihan Menjahit	20
17.	Terapi CP	35
18.	Terapi Wicara	35
Jumlah		1.886

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal (2024)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 74.928 data layanan anak pada tahun 2023 meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Layanan Yatim Piatu. Adapun untuk layanan bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal terdiri atas berbagai layanan termasuk layanan yang ditunjukkan bagi komunitas penyandang disabilitas seperti Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI), Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS), dan lain-lain. Adapun terdapat sejumlah pelatihan dan terapi bagi para penyandang disabilitas akan tetapi pelayanan yang diberikan masih

terlalu minim mengingat tidak sepadan jumlah data layanan dengan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal yang sebanyak 7.239 difabel. Adapun rincian jumlah difabel di Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam data sebagai berikut.

Tabel 4.4. Jenis dan Jumlah Disabilitas Terdata di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah	Persentase
1.	Tuna daksa / cacat tubuh	47 Difabel	0,64%
2.	Anak <i>Cerebral Parsy</i>	127 Difabel	1,75%
3.	Tuli wicara	93 Difabel	1,28%
4.	Tuna netra	38 Difabel	0,52%
5.	Tuna rungu	107 Difabel	1,47%
6.	Autis dan <i>down syndrome</i>	43 Difabel	0,59%
7.	Cacat fisik dan mental	66 Difabel	0,91%
8.	Cacat mental retardasi	6.363 Difabel	87,8%
9.	Cacat lainnya	355 Difabel	4,90%
Total		7.239 Difabel	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Tahun 2023

4.2. Kelembagaan, Kewenangan, dan Aparatur Daerah

A. Kelembagaan Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat dari regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa jenis perangkat daerah yang diatur antara lain: (1) Sekretariat Daerah, (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (3) Inspektorat, (4) Dinas Daerah, (5) Badan Daerah, (6) dan, (7) Kecamatan.

Berikut adalah Dinas Daerah yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, Dinas Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain Dinas Daerah, terdapat beberapa Badan Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah. Adapun Perangkat Daerah yang memiliki atau menjalankan fungsi perencanaan daerah adalah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tegal. Beberapa perangkat daerah lainnya yang terlibat khususnya dalam memperhatikan dan memastikan pembangunan kelompok-kelompok rentan antara lain Dinas Sosial Kabupaten Tegal dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Bappedalitbang Kabupaten Tegal sebagai *leading sector* dalam menjalankan fungsi perencanaan di daerah memiliki sejumlah kewenangan antara lain:

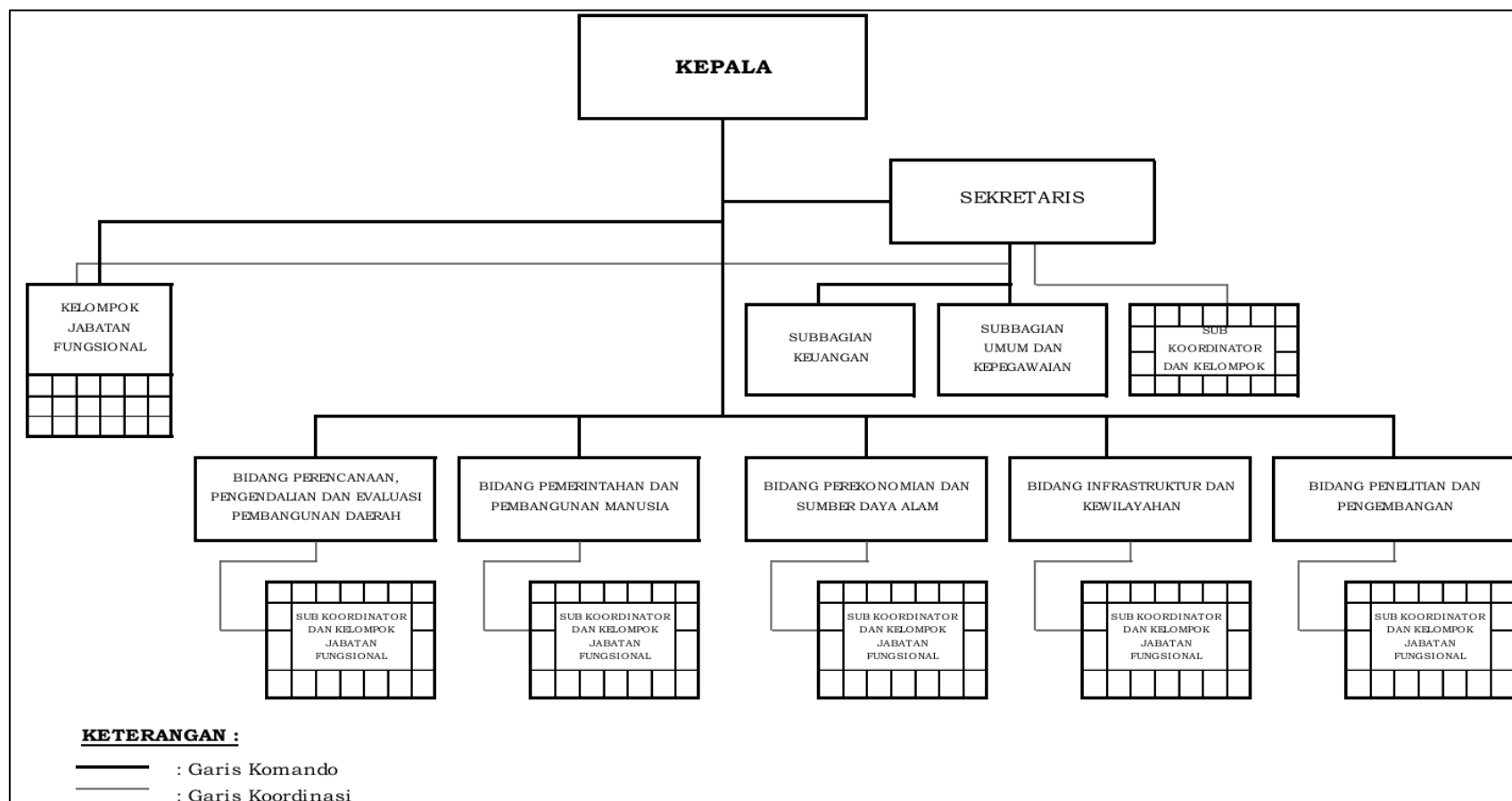
- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; komunikasi dan informatika; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan; transmigrasi.

- 2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang perekonomian dan pengembangan infrastruktur yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; pertanahan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pangan; lingkungan hidup; perhubungan; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; perikanan, pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
 - 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Badan yang mengampu fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang dan fungsi lain sesuai peraturan perundangan;
- b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah daerah.
 - 2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan.
- c. Pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi:
- 1) Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.
 - 2) Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah tahunan.
 - 3) Pelaporan hasil evaluasi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
- d. Pelaksanaan perumusan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kelitbangan (kelitbangan dan pengelolaan data, pengkajian, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi) sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pemanfaatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Badan

Berdasarkan lampiran I.A Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, Bappedalitbang Kabupaten Tegal memiliki susunan organisasi dan tata kelola sebagai berikut:



Gambar 4.8. Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Tegal

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan data kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Tegal pada Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 33 pegawai, yang terdiri atas 18 pegawai laki-laki (54,55%) dan 15 pegawai perempuan (45,45%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non-ASN) sebanyak 7 pegawai, yang terdiri dari 4 pegawai Non-ASN laki-laki (57%) dan 3 pegawai Non-ASN perempuan (43%). Sehingga jumlah total ASN dan Non-ASN pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal adalah sebanyak 40 pegawai.

Tabel 4.5. ASN dan Non-ASN Bappedalitbang Kabupaten Tegal

No.	Jenjang Pendidikan	ASN		NON ASN	
		Jumlah (Pegawai)	(%)	Jumlah (Pegawai)	(%)
1.	S3	1	3,03	-	-
2.	S2	8	24,24	-	-
3.	S1/D4	20	60,61	5	71,43
4.	D3	-	-	1	14,29
5.	SMA	4	12,12	1	14,29
Jumlah		33	100	7	100

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal (2024)

Berdasarkan jenjang pendidikan untuk ASN Bappedalitbang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S3 sebanyak 1 (3,03%) lulusan S2 sebanyak 8 (24,24%) pegawai, lulusan S1/diploma IV sebanyak 20 (60,61%) pegawai dan lulusan SMA sebanyak 4 (12,12%) pegawai. Sedangkan untuk pegawai Non-ASN, 7 orang (71,43%) yang merupakan lulusan S1/DIV, 1 orang (14,29%) lulusan D3, sisanya sebanyak 1 orang (14,29%) merupakan lulusan SMA.

4.3. Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “B”, nilai 64,25. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tegal mulai tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Nilai SAKIP Kabupaten Tegal Tahun 2020-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	62,56	63,26	64,25	73,61

Sumber: LKjIP Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023

Nilai SAKIP Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah 64,25 atau dengan predikat B. Capaian realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023 belum melampaui target tahun 2023 (65,21) dan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,61 sehingga progres capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 87,28%. Dengan menyisakan waktu 1 tahun untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 73,61 dibutuhkan kerja keras dimana hasil penilaian SAKIP dari tahun ke tahun masih dikisaran nilai 60-an. Sementara Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah 71,12 atau dengan predikat BB.

Tabel 4.7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir RPJMD
	Target	Realisasi	%	
Indeks Reformasi Birokrasi	68,31	77,6	113,59	65,69

Sumber: LKjIP Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023